



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : DPR minta percepat pemindahan ASN
Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3



IPM1 SEKRETARIAT PRESIDEN CITRA

Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

DPR Minta Percepat Pemindahan ASN

Selain mengapresiasi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke IKN, DPR juga meminta pemerintah mempercepat pemindahan ASN ke sana.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara. Langkah tersebut dinilai sebagai pesan politik yang memperkuat komitmen melanjutkan pembangunan IKN. Namun, tidak berhenti di situ, Presiden diharapkan segera memulai pemindahan aparatur sipil negara ke IKN.

Untuk pertama kalinya sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo mengunjungi IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026). Kunjungan itu dilakukan setelah Presiden meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak dari Sekolah Rakyat Banjar Baru, Kalimantan Selatan, dan meresmikan infrastruktur energi terintegrasi pengembangan kilang Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kaltim. Dalam kunjungan ini, Presiden juga bermalam di IKN.

Pada Selasa (13/1) pagi, Presiden mendengarkan laporan perkembangan dari Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan penekanan untuk mempercepat pembangunan fasilitas untuk lembaga legislatif dan yudikatif yang ditargetkan selesai pada 2028.

"Jadi, tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden koreksi. Pertama, misalnya, mengenai desain. Kedua, mengenai fungsi, dan diminta terus menerus OIKN dan Kementerian PUPR untuk memperbaiki," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/1), Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengaku senang karena Presiden akhirnya mengunjungi IKN. Bagi

dia, hal itu menjadi pesan politik yang memperkuat komitmen untuk melanjutkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Pesan politik pertama, kata Rifqinizamy, telah ditunjukkan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dalam perpres, disebutkan bahwa IKN bakal ditetapkan sebagai ibu kota politik RI pada tahun 2028.

Hal itu lantas diperkuat melalui pesan politik kedua yang disampaikan melalui kunjungan Presiden ke IKN. Kehadiran Presiden di IKN juga menunjukkan adanya perhatian terhadap proyek itu.

"Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir," tutur Rifqinizamy.

Dua pekan sebelum Presiden berkunjung ke IKN, Wakil Presiden Gibran Rakabuming lebih dahulu ke sana. Pada 30-31 Desember 2025, Gibran meninjau pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan hunian ASN, pasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, serta pasar tradisional di kawasan IKN yang sudah ditata ulang.

Selain itu, Gibran meninjau pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif IKN. Pembangunan sejumlah gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif itu sudah dimulai sejak awal Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2027.

Gibran sudah dua kali ke IKN. Pada akhir Mei 2025, ia juga meninjau pembangunan IKN. Gibran menegaskan, kunjungan keduanya merupakan bukti komitmen bahwa pemerintah akan melanjutkan

pembangunan IKN sesuai dengan Perpres No 79/2025.

Perpindahan ASN

Dengan komitmen politik yang sudah ditunjukkan, baik melalui perpres maupun kunjungan Presiden, menurut Rifqinizamy, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan IKN. Apalagi, DPR juga telah mengesahkan anggaran pembangunan hampir Rp 100 triliun.

"Tentu akan sangat mubazir kalau kemudian pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai ibu kota negara," ujarnya.

Dia menuturkan, pemindahan IKN perlu dimulai dengan memindahkan 1,3 juta aparatur sipil negara (ASN) yang ada di kementerian/lembaga di pusat secara bertahap. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB) telah membuat cetak biru pemindahan ASN yang, antara lain, terdiri dari strategi dan urutan pemindahan berdasarkan kementerian/lembaga. Rumah untuk 15.000 ASN juga sudah dibangun.

"Tapi tentu mereka (Kempan dan RB) harus menunggu restu dari Presiden. Nah, saya kira setelah Presiden mengecek sendiri tadi malam, mudah-mudahan hal ini bisa segera diputuskan," kata Rifqinizamy.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menuturkan, pihaknya mengapresiasi kunjungan Presiden ke IKN. Langkah itu membuktikan bahwa pembangunan IKN merupakan warisan dari periode sebelumnya yang harus diselesaikan.

Komisi II pun mendapatkan tugas untuk menyelesaikan tata kelola IKN, tak terkecuali pemantauan terhadap pengiriman ASN serta kesi-

apan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan di sana.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong juga mengapresiasi kunjungan pertama Prabowo sebagai Presiden ke IKN. Kehadiran Presiden di IKN disebutnya sebagai sinyal positif atas keberlanjutan pembangunan ibu kota negara baru.

Kunjungan tersebut juga menunjukkan dukungan langsung Presiden terhadap agenda strategis nasional yang telah dirintis sebelumnya. "Kehadiran presiden di IKN merupakan hal positif dan itu bagian dari dukungan atas keberlanjutan pembangunan IKN," kata Bahtra.

Progres pembangunan

Otorita IKN mencatat, sampai akhir 2025, pembangunan Kantor Kementerian Koordinator, Istana Presiden, Istana Garuda, dan sejumlah apartemen ASN telah selesai dibangun. Sedikitnya 2.000 ASN telah bekerja dan ber Kantor di ibu kota baru tersebut.

Mulai akhir 2025, IKN memasuki tahap dua pembangunan. Jika sebelumnya pembangunan fokus pada infrastruktur dasar dan kantor lembaga eksekutif, pembangunan kini fokus pada kompleks lembaga yudikatif dan legislatif.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, mulai 2026, pembangunan kantor lembaga legislatif, yudikatif, dan apartemen untuk pejabatnya dibangun. Sebelumnya, pada 2025, sedikitnya 7.000 pekerja konstruksi tinggal di hunian pekerja konstruksi (HPK).

"Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN," katanya. (NIA/RTG/INA/SYA/CIP)